



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.560>

PENGLOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT DESA BANYUURIP KABUPATEN MAGELANG

Lestari Sukarniati¹, Firsty
Ramadhona Amalia Lubis^{*2},
Maman Faudzi³

^{1,2,3}Ekonomi Pembangunan, Universitas
Ahmad Dahlan, Indonesia

Article history

Received : 04 April 2023

Revised : 05 Mei 2023

Accepted : 01 Juni 2023

Available Online : 30 Juni 2023

*Corresponding author :

Nama : Firsty Ramadhona Amalia Lubis

Email : firsty.ramadhona@ep.uad.ac.id

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

Kondisi kesejahteraan rata-ratanya rendah dan sedang maka pengabdian ingin melakukan pengabdian masyarakat dengan tema pengelolaan dana desa di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dengan harapan kemampuan aparat dalam memanfaatkan Dana Desa semakin baik, kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa semakin meningkat dan pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan warga. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu kegiatan yang dapat Pengabdian yang dilaksanakan di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada aparat desa Banyuurip tentang sistem mengelola dana desa, pemantauan dana desa dan sistem pengoptimalan dana desa melalui BUMDES. Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2023 dan dilakukan oleh 2 orang dosen beserta dengan 1 mahasiswa. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Terakhir pada Sesi Ketiga pemateri menjelaskan mengenai sistem pengelolaan Dana Desa melalui pengoptimalan BUMDES dengan melihat potensi Desa yang dimiliki. Keaneekaragaman, kekhasan dan keunikan yang dimiliki Desa Banyu Urip merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya perlu dilestarikan dan dikelola sehingga meningkatkan kemandirian kesejahteraan masyarakat di wilayah. Kegiatan pengabdian berjalan lancar peserta antusias dalam mengikuti materi.

Keyword: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, BUMDES

Abstract

The average welfare condition is low and moderate, so the pengabdian wants to do community service with the theme of village fund management in Banyuurip Village, Tegalrejo Subdistrict, Magelang Regency with the hope that the ability of the apparatus to utilize the Village Fund is getting better, community concern for village development is increasing and ultimately there is an increase in the welfare of the residents. Maintaining environmental cleanliness is one of the activities that can be carried out in Banyuurip Village, Tegalrejo Subdistrict, Magelang Regency. This service aims to provide knowledge to Banyuurip village officials about the system for managing village funds, monitoring village funds and optimizing village funds through BUMDES. This service uses socialization and training methods which were carried out on March 9, 2023 and carried out by 2 lecturers along with 1 student. The distribution of Village Funds from RKUD to Village Accounts and Reports on the realization of distribution and consolidation of the use of Village Funds. Finally, in the Third Session, the speaker explained about the Village Fund management system through optimizing BUMDES by looking at the potential of the Village. The diversity, distinctiveness and uniqueness of Banyu Urip Village are part of the wealth, potential and resources that need to be preserved and managed so as to increase the independence of community welfare in the region.. The service activity went smoothly and the participants were enthusiastic in following the material.

Keywords: Village Fund, Village Fund Management, BUMDES.

PENDAHULUAN

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional. Tujuan dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian mengatasi kesenjangan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa demi terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Salah satu Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya, anggaran alokasi Dana Desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan. Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas (Karimah dkk, 2017)

Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Rozaki dkk (2005). Ada 4 (empat) hal penting untuk memahami tentang otonomi desa, yakni :

1. Pertama, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Kedua, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya.
3. Ketiga, melalui UU No.6/2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi.
4. Keempat, dengan menggabungkan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat (Nyimas & Aziz, 2016).

Dalam Pengelolaan dana desa pemerintah telah mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pedoman pengelolaan ADD. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten No 36 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD. Banyaknya regulasi dan peraturan, serta sanksi yang ditetapkan oleh pihak pemerintah seringkali menjadi kendala terutama berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa. Tuntutan birokrasi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) justru menjadikan dilema bagi Desa dalam pengelolaan ADD. Hal ini dikarenakan disatu sisi Desa yang merupakan bagian terkecil dari sistem pemerintahan dituntut untuk diberdayakan dengan kebijakan otonomi desa, akan tetapi di sisi lain kondisi dan kemampuan sumber daya baik SDM maupun SDA yang belum mampu untuk

mendukung seluruh proses pembangunan daerah pedesaan, sehingga konsep otonomi desa dalam arti yang seluas- luasnva belum bisa terlaksana secara optimal (Lili, Marselina, 2018).

Jumlah desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 74.000 (tujuh puluh empat ribu) dengan demikian pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sampai dengan UU No.32/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal masyarakat hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan pembangunan sehingga terjadi gap yang tinggi antarwilayah, kemiskinan, sosial budaya, dan lingkungan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu ada suatu gerakan pembaharuan desa untuk meredam semua itu, khususnya dalam memahami otonomi desa (Nyimas, Aziz, 2016).

Desa Banyuurip adalah salah satu desa di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 3214 orang. Permasalahan yang dihadapi desa Banyuurip adalah dalam hal infrastruktur diantaranya adalah jalan poros jalan desa yang rusak yang menyebabkan masalah transportasi, belum baiknya prasarana pertanian yakni irigasi sehingga menjadi beban bagi masyarakat yang sebagian adalah petani, pencemaran tanah dan udara dan sebagian lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih efek dari adanya tempat pembuangan sampah akhir. Kondisi yang demikian tentu saja memerlukan pengelolaan dana yang tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat dan dikelola secara efisien. Selain adanya kebutuhan pengelolaan dana yang efisien, permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi warga desa dalam memajukan desanya (Profil Desa Banyuurip 2014).

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada aparat Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang tentang sistem mengelola dana desa, pemantauan dana desa dan sistem pengoptimalan dana desa melalui BUMDES. Prodi Ekonomi Pembangunan UAD tidak asing lagi dengan Desa Banyuurip. Tahun 2016 Prodi Ekonomi Pembangunan pernah melakukan sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pemulung yang berada di lokasi pembuangan sampah akhir yang terletak di Desa Banyuurip. Selain melakukan sosialisasi, Tim juga melakukan kajian tentang kondisi sosial ekonomi dan Kesejahteraan pemulung yang sebagian merupakan penduduk desa Banyuurip dengan menggunakan Indikator Badan Pusat Statistik.

Hasil kajian menemukan bawa kondisi kesejahteraan rata-ratanya rendah dan sedang maka pengabdian ingin melakukan pengabdian masyarakat dengan tema pengelolaan dana desa di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang dengan harapan kemampuan aparat dalam memanfaatkan Dana Desa semakin baik , kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa semakin meningkat dan pada akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan warga.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan. Metode sosialisasi dan pelatihan meliputi sistem pengelolaan dana desa. Pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2023. Pengabdian ini melibatkan mahasiswa dalam membantu sebagai suporting staf dan kesempatan untuk belajar terutama konsentrasi perencanaan pembangunan karena sesuai dengan mata kuliah yang di pelajari.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dana desa dilakukan di ruang rapat Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang berjalan lancar. Sesi pertama, dimulai dengan materi pentingnya pengelolaan dana desa. Pada Sesi Pertama diberikan materi tentang Dana Desa. Pemberian dana desa kepada setiap desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi agar setiap desa menggunakan dana sesuai kebutuhan desa dan memberikan dampak positif secara langsung (Pramukti, 2019). Dana Desa berse sumber dari APBN yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa, hak usul atau tradisional. Pemberian Dana Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengetaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli daerah, Alokasi APBN, bagian pajak daerah dan retribusi daerah, Alolasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah (UU No 6 Pasal 72 Ayat 1, 2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut asas desentralisasi yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa didanai dari beban APBDes. Azas tugas pembantuan merupakan bagian penyelenggaraan pemerintahan Desa yang didanai oleh tingkat pemerintahan yang menugaskan (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten atau Kota)

Sesi Kedua pemateri menjelaskan bagaimana proses pemantauan Dana Desa. Materi yang disampaikan bagaimana Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati/ Walikota setiap semester, dengan ketentuan Semester 1 paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan, Laporan Realisasi Anggaran untuk dana yang telah digunakan merupakan salah satu output yang wajib dilaksanakan setiap Desa. Pengawasan dan evaluasi pengalokasian penyaluran penggunaan Dana Desa diawasi langsung oleh DJPK Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa.

Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati atau walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa dan Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa. Terakhir pada Sesi Ketiga pemateri menjelaskan mengenai sistem pengelolaan Dana Desa melalui pengoptimalan BUMDES dengan melihat potensi Desa yang dimiliki. Keanekaragaman, kekhasan dan keunikan yang dimiliki Desa Banyu Urip merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya perlu dilestarikan dan dikelola sehingga meningkatkan kemandirian kesejahteraan masyarakat di wilayah.

Dokumentasi Kegiatan



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang memberikan pengetahuan kepada aparat desa Banyuurip tentang bagaimana mengelola dana desa, pemantauan dana desa dan sistem pengelolaan dana desa melalui BUMDES yang diharapkan efektif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang telah bekerja sama sebagai mitra dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Tim Pengabdian Universitas Ahmad Dahlan yang telah mencurahkan segala upaya agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada mitra. Terakhir, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Karimah, Dkk. (2017) “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT STUDI PADA DESA DEKET KULON KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN). JAP.Vol 2. Pp 597-602.
- Lili, Marselina. (2018). PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA MAGMAGAN KARYA KECAMATAN LUMAR. Tesis
- Nyimas, Azizah. (2016). OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS DANA DESA. JURNAL PENELITIAN POLITIK. Volume 13 no 2
- Peraturan Daerah. No 36 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD
- Profil Desa Banyuurip. (2014) DESA BANYUURIP
- Pramukti, Andika. (2019). LITERASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA SANBORE KABUPATEN TAKALAR. Jurnal Buletin Udayana Mengabdi. Vol 18. No 3, Hal 68-71.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2005). PRAKARSA DESENTRALISASI DAN OTONOMI DESA. Yogyakarta, IRE Press.